

## IMPLEMENTASI KURIKULUM MUATAN LOKAL DI SEKOLAH

Oleh: Suyitno Al.

FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta

### ABSTRAK

Kurikulum Muatan Lokal (KML) Pendidikan Dasar telah dirintis sejak 1987 dan diperbaharui pada kurikulum tahun 1994. KML dengan bobot 20% dari Kurikulum Nasional memiliki fungsi strategis untuk memberikan bobot atau warna pendidikan dasar menurut kebutuhan pembangunan daerah. KML akan membawa anak didik yang memahami permasalahan pembangunan di daerahnya.

Pelaksanaan KML di sekolah selama ini masih sangat terbatas karena berbagai kendala. Kendala itu sebagian bersumber dari keterbatasan kemampuan sekolah, kurangnya dukungan dari Dinas P & K dan belum berkembangnya jalinan kerja sama sekolah dengan masyarakat di sekitarnya.

Langkah konkret yang perlu dilakukan oleh Dinas P & K adalah melakukan pembinaan guru, pengadaan fasilitas dan membantu pengembangan kerja sama antarsekolah dan antara sekolah dengan masyarakat atau lembaga yang relevan. Dengan meningkatnya mutu implementasi KML di sekolah, dapat diharapkan mencetak anak didik yang memahami potensi dan kebutuhan pembangunan daerah serta memiliki keterampilan dasar yang berguna sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Kata kunci: KML; pengembangan implementasi

### IMPROVEMENT OF THE LOCAL CONTENT CURRICULUM'S IMPLEMENTATION AT SCHOOL

#### ABSTRACT

The elementary education's Local Content Curriculum (LCC), initiated in 1987 and renewed in 1994, which constitutes 20% of the National Curriculum, has the strategic function of giving elementary education the content or color that will make it fit the needs of regional development. LCC will result in students who understand the problems of development in their area.

The implementation of LCC all this time has been very limited because of various constraints. The constraints partly come from the limited capabilities of schools, the lack of support from the Department of Education and Culture, and the undeveloped cooperation between schools and the surrounding community.

Concrete steps that the Department of Education and Culture need to take are conducting teachers' upgrading, providing facilities, and assisting the development of cooperation between one school and another and between schools and society or other relevant institutions. The improvement on the quality of LCC's implementation at schools will hopefully produce students who understand the potentials and needs of regional development and possess useful basic skills so that they can participate in the national development.

Key Words: Local Content Curriculum, implementation improvement

#### Pendahuluan

Pada pendidikan dasar, telah diberlakukan kurikulum muatan lokal (KML) mulai tahun 1987. Dilihat dari substansinya, program ini memberikan harapan untuk menghasilkan pola pendidikan "plus". Pola ini tampaknya perlu dikembangkan bukan saja di pendidikan dasar, tetapi juga di pendidikan menengah.

Untuk pelaksanaan KML di sekolah dibutuhkan perangkat seperti buku acuan pengembangan, GBPP, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknisnya. Di samping itu, dibutuhkan pula pemahaman guru, kepala sekolah, dan para pengawas terhadap KML. Faktor penting yang lain adalah kemampuan sekolah seperti sarana, prasarana, dana dan sumber daya pengampunya, serta dukungan masyarakat sekitar. Namun dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan KML di sekolah banyak menghadapi kendala. Suharsimi (1996: 8-9) melaporkan bahwa kendala pelaksanaan KML antara lain belum dipahami secara jelas KML oleh para guru, kepala sekolah, dan pengawas di lapangan sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda-beda. Guru kesulitan dalam menjabarkan jenis bahan kajian atau bentuk kegiatannya. Tenaga guru pengampu KML yang memiliki kemampuan sesuai dengan bahan kajian yang dikembangkan juga masih kurang. Menurut temuan Suyitno, dkk (1996: 35), kendala pelaksanaan KML di Kotagede Yogyakarta yang menonjol adalah (1) keterbatasan dana dan sarana, (2) belum tersedianya guru yang

memiliki kemampuan dan keterampilan memadai pada bidang muatan lokal (Mulok) yang dipilih sekolah, (3) rendahnya partisipasi orang tua murid, dan (4) belum berkembangnya jalinan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga yang terkait.

Kendala penting lainnya adalah kurangnya perhatian siswa mengikuti KML karena status KML hanya sebagai mata pelajaran tambahan. Pusat perhatian sekolah, para guru, dan siswa lebih terfokus pada mata pelajaran yang digunakan untuk EBANAS. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila pelaksanaan KML di sekolah hingga kini sulit berkembang, walaupun KML telah dirintis sejak 10 tahun silam. Permasalahan pokoknya adalah apa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dan mengembangkan implementasi KML di sekolah.

### Karakteristika KML

Tujuan pokok pendidikan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional senantiasa berpijak pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan kebutuhan pembangunan. Dalam penyelenggaraannya, UUSPN pasal 37 menggariskan bahwa:

*"Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan"*.

Dalam pelaksanaan pasal tersebut adalah diberlakukannya Kurikulum Muatan Lokal.

Kurikulum muatan lokal dikembangkan berdasar pada UUSPN pasal 38 yang menghendaki agar pelaksanaan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. Bertolak dari ketentuan tersebut, menurut Suharsimi (1996: 2) terdapat tiga bagian penting pada kurikulum yang diharapkan, yakni:

1. kurikulum nasional dengan cara mengajar dan sumber belajar yang digunakan diambil dari lingkungan setempat,
2. lingkungan setempat yang digunakan untuk memperkaya kurikulum nasional,
3. kurikulum muatan lokal yang bahan kajiannya diambil dari lingkungan alam dan sosial budaya serta keterampilan fungsional yang ada di mana sekolah itu berada, yang dapat memberi wawasan yang mantap kepada siswa tentang daerahnya.

KML dikembangkan pada kurikulum pendidikan dasar mulai tahun 1987 dan disempurnakan dalam kurikulum 1994. KML diberlakukan secara nasional sebagai mata pelajaran yang terpisah, dan menempati porsi sampai dengan 20 persen dari kurikulum Nasional. Isi atau bahan kajian yang dipilih untuk muatan lokal sesuai dengan budaya, potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh sebab itu, pemilihan jenis bahan kajian untuk muatan lokal di sekolah harus dipilih sesuai budaya, potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Terdapat tiga sasaran pokok pelaksanaan KML, yaitu: (1) mengakrabkan siswa pada nilai-nilai sosial budaya dan lingkungannya, (2) mengembangkan keterampilan fungsional yang dapat menunjang kehidupan, dan (3) menumbuhkan kepedulian siswa terhadap masalah-masalah lingkungan. Sesuai dengan tujuan pokok pelaksanaan KML tersebut, pemilihan bahan kajian dalam KML didasarkan pada 3 hal pokok, yakni: (1) budaya dan potensi setempat, (2) ketrampilan khusus sesuai kebutuhan atau potensi lingkungannya, dan (3) masalah-masalah sosial dan lingkungannya yang perlu dipecahkan.

KML diberlakukan di SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Muatan lokal wajib diberikan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan bobot 2 SKS. Di kelas 3, selain muatan wajib, siswa diwajibkan mengikuti satu macam muatan pilihan 2 SKS. Di kelas 4, selain muatan wajib, siswa diwajibkan mengambil satu macam muatan pilihan dengan bobot 3 SKS. Sedangkan di kelas 5 dan 6, siswa diwajibkan menempuh dua macam muatan pilihan, masing-masing 2 SKS. Dalam kurikulum pendidikan dasar, bobot muatan lokal yang wajib diberikan dapat disimak pada tabel berikut ini.

Tabel 1.

## Susunan Program Pelajaran Kurikulum Pendidikan Dasar 1994

No.	Mata Pelajaran	SD Kelas						SLTP Kelas		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3
1.	PPKN	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.	Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	10	10	10	8	8	8	6	6	6
4.	Matematika	10	10	10	8	8	8	6	6	6
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	3	6	6	6	6	6	6
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	3	5	5	5	5	5	5
7.	Kerajinan Tangan dan Kesenian (KTK)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9.	Bahasa Inggris	-	-	-	-	-	-	4	4	4
10.	Muatan Lokal	2	2	4	5	7	7	6	6	6
Jumlah		30	30	38	40	42	42	42	42	42

Ket: 1 jp kelas 1 dan 2 = 30 menit; 1 jp kelas 3 - 6 = 40 menit  
1 jp untuk SLTP = 45 menit

Terdapat dua kelompok bahan kajian muatan lokal KML yang diberlakukan yakni muatan lokal wajib dan muatan pilihan. Pemilihan macam muatan wajib diserahkan kepada kebijakan Dinas P dan K propinsi masing-masing. Di samping itu, oleh tim pengembang KML ditentukan pula beberapa macam muatan lokal pilihan, sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib di SD dan SMP. Macam muatan lokal pilihan yang ditetapkan (Marjana Basri, 1996: 4) adalah sebagai berikut:

1. SD meliputi bidang: karawitan, pertanian, menganyam, membuat, mengukir, otomotif, PKK dan bahasa Inggris;
2. SMP, selain bahan kajian seperti yang diberlakukan di SD, ditambah dengan mengetik, administrasi, dan pariwisata.

### Potensi KML dan Pembangunan

Dalam rumusan pasal 38 UUSPN yang menjadi landasan pengembangannya tersirat ada tiga tujuan khusus KML, yakni:

- 1) mengenalkan siswa lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya agar sanggup melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya

setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

- 2) memberikan bekal ketrampilan dasar, ketrampilan untuk kehidupan dan untuk penghasilan, dan
- 3) melatih siswa menyadari akan lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dalam membantu mencari pemecahannya.

Dalam implementasinya, menurut Evelina dan Suharsimi (1996:3), materi muatan lokal dapat didasarkan 3 sumber, meliputi (1) budaya lokal, (2) keterampilan dasar yang menunjang untuk memperoleh pendapatan, dan (3) masalah-masalah sosial dan lingkungannya. Bila KML dapat dikembangkan implementasinya secara memadai di sekolah-sekolah, hal ini akan menghasilkan generasi yang sungguh-sungguh memahami budaya, keadaan daerah, dan kebutuhan pembangunan. Sebaliknya, pendidikan yang bahan kajiannya tidak berpijak pada potensi daerah, justru akan menghasilkan generasi yang "terasing" di negerinya sendiri.

Secara konsepsional, substansi KML yang menempati porsi 20 persen kurikulum pendidikan dasar memiliki potensi bangsa dan alamnya, serta memberi nilai tambah dengan terbinanya beberapa jenis keterampilan praktis yang berguna dalam hidupnya.

Porsi 20 persen ini hendaknya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar dapat memberi warna pendidikan di setiap daerah, sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini akan dapat dilakukan bila Dinas P dan K bersama masyarakat sekolah dapat membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam membangun sistem yang dapat mendorong implementasi KML di sekolah.

KML dikembangkan oleh tim perekayasa di pusat dan dijabarkan lebih operasional oleh Tim Perekayasa KML daerah (otonomi daerah). Dalam pelaksanaannya, KML pilihan diserahkan kepada masing-masing sekolah. Otonomi daerah untuk menetapkan macam muatan lokal wajib dan pilihan merupakan peluang bagi pengembangan kurikulum untuk memberi warna pendidikan "plus" bagi sekolah-sekolah di daerahnya. Untuk daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, sangat relevan dipilih bahasa Inggris sebagai muatan lokal yang diselenggarakan. Seperti di daerah Kotagede Yogyakarta (Suyitno, dkk. 1996: 23), sebagian besar SD memilih bahasa Inggris sebagai muatan pilihan unggulannya. Berbagai alternatif bidang keterampilan yang hidup atau berkembang di daerah dan memberi prospek ekonomi bagi masa depan merupakan alternatif yang sangat potensial dikembangkan di sekolah sebagai muatan lokal pilihan.

### Alternatif Pengembangan Implementasi KML

Otonomi daerah dan sekolah dalam menentukan materi KML merupakan kesempatan emas yang perlu dimanfaatkan dalam implementasinya. Otonomi memberi peluang terjadi diversitas macam dan jenis bahan kajian KML antardaerah. Peluang pengembangan implementasi KML di sekolah khususnya untuk muatan pilihan dapat menyangkut: (1) sistem pengelolaan KML, (2) pendekatan pembelajaran, (3) pemilihan jenis dan muatan bahan kajian, dan (4) orientasi pemilihan bahan kajian.

#### a. Sistem Pengelolaan KML

Upaya peningkatan kualitas pengelolaan setidaknya menyangkut persoalan pengembangan ketenagaan, pengelolaan pelaksanaan dan pengembangan sarana prasarana. Karena keterbatasan kemampuan sekolah, pelaksanaannya menghadapi banyak kendala. Untuk mengatasi hal ini, perlu dikembangkan sistem pengelolaan yang bertumpu pada jalinan kerja sama antarsekolah, sekolah-orang tua murid, sekolah-tokoh masyarakat atau dengan lembaga-lembaga yang relevan di wilayahnya. Jalinan

kerja sama yang luas dan intensif akan sangat memberi harapan untuk mendapatkan dukungan baik berupa dana, sarana-prasarana, tenaga, dan pelatihan.

Suatu contoh kasus pelaksanaan KML di SD daerah Kotagede cukup menarik untuk diamati. Suyitno dkk (1996: 22) menemukan bahwa selain bahasa Jawa sebagai mata pelajaran mulok wajib, terdapat dua mata pelajaran mulok pilihan yang diselenggarakan di semua sekolah yakni bahasa Inggris dan PKK. Selain itu, beberapa sekolah memilih mata pelajaran tari dan pertanian. Namun demikian, hampir seluruh mata pelajaran mulok tersebut diampu oleh para guru kelas yang "dianggap mampu" di antara para guru yang dimiliki sekolah. Untuk mata pelajaran mulok bahasa Inggris, hanya sekolah tertentu saja yang mengusahakan tenaga guru profesional dari kalangan orang tua murid yang kebetulan seorang guru bahasa Inggris. Di sisi lain, di SD-SD Kotagede ditemukan guru-guru dengan keterampilan khusus dalam 11 jenis, namun keberadaannya menyebar tidak merata. Bidang keterampilan tersebut meliputi masakan tradisional, menjahit, pertanian, tari tradisional, menganyam, kerawitan, membatik, perbengkelan, membatik, dan pertukangan. Potensi tersebut akan dapat dimanfaatkan secara maksimal bila dapat dikembangkan kerja sama dan pengelolaan yang baik. Optimalisasi kerja sama perlu dilakukan antarsekolah, antara sekolah dengan wali murid, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di sekitarnya serta dengan lembaga terkait yang relevan.

Kerja sama antarsekolah yang berdekatan atau dalam gugus akan diperoleh beberapa keuntungan. Keuntungan itu antara lain (1) membangun forum untuk saling asah dan asuh, (2) pertukaran tenaga pengajar, (3) dikembangkannya sistem "Team teaching" antarsekolah, dan (4) penggunaan dan pengadaan sarana secara bersama sehingga menjadi lebih ringan bebannya.

Intensifikasi kerja sama sekolah dengan wali murid dan masyarakat sekitarnya, dapat membawa manfaat bagi sekolah antara lain: (1) mendapatkan bantuan tenaga guru terampil yang dibutuhkan, seperti bantuan tenaga guru bahasa Inggris, guru tari dan bidang-bidang lain yang dimungkinkan, (2) dukungan sarana dan prasarana baik berupa alat seperti perangkat gamelan atau alat musik tradisional yang digunakan untuk berlatih maupun sebagai tempat kunjungan belajar para siswa, (3) guru mendapat kesempatan berlatih atau dibina secara informal oleh tenaga terampil dari kalangan masyarakat sekitarnya tentang keahlian tertentu, dan (4) berkembangnya hubungan timbal balik

yang lebih erat dan fungsional antara sekolah dan masyarakat sekitarnya.

Kerjasama dengan lembaga terkait yang relevan memungkinkan sekolah memperoleh dukungan dalam beberapa hal, seperti (1) bantuan dalam bentuk dana, sarana dan tenaga pelatih atau setidaknya berupa fasilitas sebagai tempat kunjungan belajar bagi para siswa, seperti: Dinas Pertanian, pusat agro industri, sanggar-sanggar seni (tari, ukir, pahat), museum, pusat industri kerajinan, bengkel, (2) bantuan pelatihan bagi para guru pengampu, dan (3) mendapat kesempatan sekolah pada lembaga pendidikan tertentu yang relevan, seperti IKIP, ISI, dan sebagainya. Upaya peningkatan keahlian dan keterampilan bagi para guru mata pelajaran muatan lokal ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan agar dapat melaksanakan tugas pembelajaran secara profesional.

Begitu banyak peluang yang mungkin diraih dari masyarakat sekitarnya untuk pengembangan pelaksanaan KML di sekolah, tetapi justru hal ini belum banyak dikembangkan. Untuk itu, Dinas dan Kanwil P&K daerah perlu memfasilitasi pengembangan kerjasama sekolah dengan lembaga dan masyarakat di daerahnya.

#### **b. Pendekatan Pembelajaran**

Pengembangan implementasi juga dapat didasarkan pada cara pendekatan pembelajarannya. Pendekatan pembelajaran materi KML tidak saja diberikan melalui mata pelajaran KML, tetapi dapat diperluas secara terintegrasi pada semua mata pelajaran yang relevan. Untuk materi yang terkait dengan lingkungan daerahnya sangat relevan diintegrasikan pada mata pelajaran IPA, geografi atau PPKN atau IPS. Perluasan implementasi KML ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan akan memberi makna yang sangat besar dalam rangka menanamkan pemahaman siswa pada potensi daerah, kebutuhan pembangunan, dan masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini akan sangat menunjang pembangunan di daerahnya. Misalnya pelajaran IPA atau geografi, persoalan-persoalan yang dibahas mengambil contoh menyangkut keadaan alam geografis atau pusat-pusat industri yang relevan yang ada di daerahnya. Berbagai potensi wisata dan budaya setempat dipadukan dalam mata pelajaran IPS.

#### **c. Pemilihan Jenis dan Muatan Bahan Kajian**

Alternatif pengembangan implementasi KML dapat diorientasikan pada pemilihan jenis atau muatan bahan kajian KML. Walaupun tersedia banyak

alternatif jenis bahan kajian berdasar potensi dan kebutuhan daerah, bahan kajian yang dikembangkan di sekolah perlu didinamisir sesuai perkembangan kebutuhan dan keadaan sekolah. Muatan bahan kajiannya dapat divariasikan agar tidak statis dan lebih menarik. Misalnya pada mata pelajaran menganyam, para guru tidak harus terpaku dengan bahan kajian tertentu (statis), namun dapat mengembangkan alternatif jenis sekaligus variasi motif dan bahan dasar anyaman. Bila dimungkinkan siswa diajak untuk mengunjungi pusat-pusat industri anyaman. Dengan kegiatan ini diharapkan para siswa dapat belajar menghayati, mengapresiasi dan memacu kreativitasnya. Untuk bahan kajian yang menyangkut budaya lokal, pembelajarannya bukan saja diberikan secara informatif untuk sekadar diketahui siswa, tetapi memberi kesempatan siswa untuk menghayati dan mengapresiasi secara individual. Pada mulok yang diorientasikan untuk mengembangkan keterampilan dasar, perlu lebih ditekankan pada aktivitas siswa berbuat dan berlatih. Sedang muatan lokal yang terkait dengan masalah-masalah sosial budaya dan lingkungannya, perlu mengajak siswa berbuat atau mencari alternatif pemecahannya.

#### **d. Orientasi Pemilihan Bahan Kajian**

##### **1. Bahan Kajian dengan Orientasi Lapangan Kerja**

Seperti kasus pelaksanaan KML yang berkembang di daerah Kotagede, secara substansial dipilihnya bidang-bidang keterampilan, budaya dan bahasa Inggris sebagai muatan lokal pilihan, memiliki makna penautan bahan kajian pendidikan dengan realitas kebutuhan hidup dan dunia kerja. Pengembangan KML demikian akan memiliki keterkaitan ("*Link and Match*") dengan dunia kerja, seperti yang intensif dikembangkan pada sekolah kejuruan. Upaya pengaitan pendidikan formal dengan dunia kerja sesuai tuntutan pembangunan, menurut Sangaji Rachman (1993: 2) merupakan wujud peningkatan mutu keluaran pendidikan. Secara pragmatis, pemilihan jenis bahan kajian sangat perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja atau prospeknya untuk menjadi lapangan kerja sektor informal.

Berdasarkan macam sektor yang dibutuhkan, Sangaji Rachman (1993: 6) menunjukkan bahwa dalam kurun PJPT-II nanti, sektor industri dan jasa merupakan sektor dominan yang akan berkembang dan menunjang perekonomian Indonesia. Jenis-jenis sektor yang membuka kesempatan atau menyerap tenaga kerja pada akhir Pelita 6 adalah sektor pertanian

(43,96 persen), industri (14,3 persen), perdagangan (15,34 persen) dan jasa (6,96 persen). Hal ini patut menjadi pertimbangan dalam penetapan prioritas macam bahan kajian muatan lokal akan dan perlu dikembangkan di sekolah. Dalam pilihan yang lebih operasional untuk sektor dominan tersebut, dapat disesuaikan dengan jenis yang banyak dibutuhkan bagi masyarakat, pembangunan daerah, dan kemampuan sekolah.

## 2. Bahan Kajian dengan Orientasi Pembinaan Jiwa Wirausaha

Keterampilan-keterampilan praktis yang diangkat sebagai bahan kajian KML hendaknya ditekankan pada bidang-bidang produktif di sektor jasa maupun barang yang memiliki prospek ekonomi. Untuk merangsang hal ini, anak perlu diajak mengunjungi pusat-pusat produksi/industri yang ada di wilayahnya. Kejelian melihat peluang bidang usaha perlu dikenalkan bagi para siswa.

Dalam situasi pertumbuhan ekonomi 0 persen sangat rendah seperti sekarang ini, serta sempitnya lapangan kerja bersamaan dengan meledaknya jumlah pengangguran atau pencari kerja, maka sudah seharusnya sekolah-sekolah mendorong, mengarahkan dan membekali siswanya dengan keterampilan agar dapat berwirausaha sendiri. Hal ini tidak mudah karena menyangkut sikap mental dan budaya yang sudah begitu mengakar ingin menjadi pegawai, terutama pegawai negeri. Menurut Ginandjar Kartasmita (Hari Dendi, 1996: 6) salah satu tantangan pokok pembangunan sumber daya manusia adalah sikap budaya yang tidak mendorong etos kerja, perubahan budaya dianggap merusak harmoni atau mengganggu kemapanaan, dan ketidakmampuan mengambil keputusan. Untuk itu dibutuhkan rekayasa atau transformasi budaya dan sekolah sebagai "agent of change" ditantang mempelopornya.

Menanamkan budaya berwirausaha merupakan salah satu wujud pembentukan sistem nilai pada diri siswa. Nilai-nilai ini sangat kondusif dikembangkan melalui mata pelajaran KML di sekolah. Pengembangan KML di pendidikan dasar juga diharapkan dapat menjembatani kesiapan lulusannya untuk masuk dunia kerja, mengingat besarnya tamatan SD yang tidak melanjutkan studi. Dari sensus tahun 1990 (Sangadji Rachman, 1993:7), angkatan kerja berbasis pendidikan rendah mencapai 76,27 persen. Dari sisi lain, Anik Gufron (1996: 7) melaporkan bahwa motivasi melanjutkan studi rendah, 84 persen menyatakan tidak ingin melanjutkan studi untuk

meringankan beban orang tua. Dari kenyataan ini maka perlu dikembangkan pendidikan "plus" mulai dari pendidikan dasar sekalipun, karena usia lulusannya mencapai usia angkatan kerja (15 tahun). Suatu paradoks bila pendidikan justru menciptakan pengangguran terdidik. Dilihat dari semangat KML, maka muatan lokal perlu juga dikembangkan untuk SMU, setidaknya dalam bentuk ekstrakurikuler unggulan yang secara intensif dilaksanakan.

## Penutup

Pengembangan KML di sekolah yang memiliki derajat pertautan tinggi dengan potensi, kebutuhan pembangunan dan permasalahan daerah serta lapangan kerja yang tersedia menjadi sangat relevan dengan kondisi dan situasi krisis yang terus berkembang saat ini dengan kebutuhan pembangunan di masa mendatang. KML yang telah dirintis di pendidikan dasar perlu terus dikembangkan implementasinya.

Untuk peningkatan mutu implementasi KML, Dinas P dan K perlu memberikan perhatian lebih serius untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan pelaksanaannya. Pengembangan kerja sama dengan pemuka masyarakat, lembaga-lembaga terkait yang relevan dan orang tua murid perlu ditingkatkan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Keberhasilan pelaksanaan KML akan membentuk anak didik yang memahami masalah dan kebutuhan pembangunan daerahnya. Implementasi KML yang berkualitas akan memberikan kesiapan para lulusan untuk masuk dunia kerja, terutama bidang informal dan tidak menambah beban pembangunan. Sebaliknya, mereka dapat berpartisipasi memacu proses pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anik Gufron. (1996). Tantangan Gerakan Wajib Belajar 9 Tahun di DIY. *Jurnal Kependidikan*, No. 1 Tahun XXVI: 1-14. Lemlit IKIP Yogyakarta.
- Depdikbud, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Evelina M. V dan Suharsimi A. (1996). *Kurikulum Muatan Lokal*. Depdikbud-Ditjen Dikdasmen, Proyek Peningkatan Mutu Pelaksanaan Wajib Belajar SLTP, Jakarta.
- Hari Dendi. (1996). *Karakteristik Tenaga Kerja yang Dibutuhkan pada Era Global*. Makalah Seminar Temu Alumni IKIP Yogyakarta: 18 Mei 1996.
- Marjana Basri. 1996. *Kurikulum Muatan Lokal dengan Berbagai Permasalahannya*. Naskah pada

Sarasehan Kebijakan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal. IKIP Yogyakarta.

Sangadji Rachman. (1993). *Prospek "Link and Match" dalam Menghadapi Dunia Kerja*. Makalah Seminar Nasional IKIP Yogyakarta: 12-13 Desember.

Suharsimi A. (1994). *Pengembangan Kurikulum Tahun 1994*. FIP IKIP Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. (1996). *Penerapan Kurikulum Muatan Lokal: Proses Operasional dan Kendalanya*. Naskah Sarasehan Kebijakan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal. IKIP Yogyakarta.

Suyitno dan Setya Hadi. (1996). *Profil Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal SD Kotagede, Kodya Yogyakarta*. Pusdikdasmen, Lemlit IKIP Yogyakarta.